

WAWASAN POLITIK-IDEOLOGIS PENDIDIKAN ISLAM DI PAKISTAN DAN IRAN: INTEGRASI DOKTRIN SUNNI-SYI'AH

POLITICAL-IDEOLOGICAL INSIGHTS INTO ISLAMIC EDUCATION IN PAKISTAN AND IRAN: INTEGRATION OF SUNNI-SHIA DOCTRINES

M.Maulani,

maulanimuhammad96@gmail.com,

Komarudin Sassi

sassikomarudin@yahoo.com

Pascasarjana Program Magister Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Al-Quran Al-Ittifaqiah (IAIQI)
Indralaya Sumatera Selatan

**EDUCATE : Journal of
Education and Culture**

**Vol. 03 Nomor 01
ISSN-e: 2985-7988**

Naskah diterima: 30-11-2024
Naskah disetujui: 20-01-2025

Terbit: 30-01-2025

Abstract: *This study explores the political-ideological insights in Pakistan and Iran concerning Islamic education, particularly focusing on the integration of Sunni and Shia doctrines within the educational systems of both countries. In Pakistan, the education system is predominantly influenced by Sunni teachings, often neglecting the existence of Shia teachings, which creates an exclusive mindset among students and exacerbates social tensions. Conversely, education in Iran is firmly based on Shia teachings, which are integrated with national identity and the political ideology of the state, frequently overlooking pluralism. Through a descriptive-analytical approach utilizing various sources, including accredited national and international journals, books, and educational policy documents from both countries, the author aims to explore the extent to which the integration of Sunni and Shia doctrines permeates the educational curriculum in Pakistan and Iran. The research findings indicate that integrating Sunni and Shia doctrines in Islamic education can contribute to a harmonious and tolerant religious life, as well as reduce the potential for prolonged conflicts in the future.*

Keywords: *Political-Ideological, Islamic Education System, Pakistan, Iran, Sunni-Shia Doctrines, Integration.*

Abstrak: *Studi ini mengeksplorasi wawasan politik-ideologis di Pakistan dan Iran mengenai pendidikan Islam, khususnya berfokus pada integrasi doktrin Sunni dan Syiah dalam sistem pendidikan di kedua negara. Di Pakistan, sistem pendidikan mayoritas dipengaruhi oleh ajaran Sunni, seringkali mengabaikan keberadaan ajaran Syiah, sehingga menimbulkan pola pikir eksklusif di kalangan pelajar dan memperparah ketegangan sosial. Sebaliknya, pendidikan di Iran sangat didasarkan pada ajaran Syiah, yang terintegrasi dengan identitas nasional dan ideologi politik negara, seringkali mengabaikan pluralisme. Melalui pendekatan deskriptif-analitis dengan menggunakan berbagai sumber, antara lain jurnal nasional dan internasional terakreditasi, buku, dan dokumen kebijakan pendidikan dari kedua negara, penulis bertujuan untuk mengeksplorasi sejauh mana integrasi doktrin Sunni dan Syiah meresap ke dalam kurikulum pendidikan di Pakistan dan Pakistan. Iran. Temuan penelitian menunjukkan bahwa mengintegrasikan doktrin Sunni dan Syiah dalam pendidikan Islam dapat berkontribusi pada kehidupan beragama yang harmonis dan toleran, serta mengurangi potensi konflik berkepanjangan di masa depan.*

Kata kunci: *Politik-Ideologi, Sistem Pendidikan Islam, Pakistan, Iran, Doktrin Sunni-Syiah, Integrasi.*

PENDAHULUAN

Pendidikan Islam merupakan salah satu pilar utama dalam membentuk identitas dan nilai-nilai masyarakat Muslim di seluruh dunia (Murray et al., 2024). Dalam banyak negara berpenduduk Muslim, pendidikan Islam tidak hanya mencakup pembelajaran agama, tetapi juga memainkan peran yang signifikan dalam memperkuat nilai-nilai sosial, budaya, dan politik (Huda, 2024). Memang diakui, pendidikan Islam secara historis berfungsi sebagai sarana untuk melestarikan tradisi keagamaan, menyebarkan pengetahuan, serta membentuk norma-norma moral yang menjadi landasan bagi perilaku individu, masyarakat dan negara (Sassi, 2021).

Dalam konteks dua negara yang memiliki populasi Muslim besar, yakni Pakistan dan Iran, pendidikan Islam berperan ganda, baik sebagai media untuk transfer ilmu pengetahuan keagamaan maupun sebagai wahana pembentukan ideologi politik yang berkaitan dengan doktrin Sunni dan Syi'ah (Baradaran Amini, S. (2024). *A shift in Shia discourse: Political necessities and Sectarian dynamics* (Doctoral dissertation, 2024). Kedua negara ini memiliki perbedaan mendasar dalam pendekatan terhadap Islam, yang berakar pada keyakinan teologis, politik, dan sejarah yang berbeda antara Sunni dan Syi'ah. Perbedaan ini menciptakan dinamika yang kompleks dalam sistem pendidikan di kedua negara, yang sering kali dibentuk oleh pengaruh ideologi politik yang dominan (Ali et al., 2024).

Konteks Pakistan

Pakistan, yang didirikan sebagai negara dengan identitas Muslim pada tahun 1947, menjadikan Islam sebagai fondasi politik dan sosialnya. Dengan mayoritas populasi yang bermazhab Sunni, pendidikan Islam di Pakistan umumnya didasarkan pada doktrin Sunni. Namun, di dalam masyarakat Pakistan juga terdapat komunitas Syi'ah yang cukup signifikan secara historis, terutama di wilayah-wilayah tertentu seperti Punjab dan Karachi (Jabbar, N., & Ali, n.d.). Dalam sistem pendidikan, kurikulum dan kebijakan pendidikan cenderung mencerminkan dominasi Sunni, dengan sedikit atau bahkan tidak ada ruang bagi representasi doktrin Syi'ah yang setara. Hal ini sering kali memperburuk ketegangan sektarian yang sudah ada di masyarakat, karena pendidikan yang didominasi satu mazhab dapat meminggirkan yang lain dan memperlebar kesenjangan dalam pemahaman lintas kelompok (Hassan, 2011).

Di sisi lain, pemerintah Pakistan juga menghadapi tantangan besar terkait dengan radikalisme pendidikan (M. Saif, 2024). Madrasah-madrasah di Pakistan, terutama yang berafiliasi dengan kelompok Sunni konservatif, seringkali mengajarkan ajaran agama yang lebih kaku dan intoleran terhadap kelompok minoritas Syi'ah.

Dalam konteks ini, pendidikan menjadi lebih dari sekadar media pembelajaran agama; ia juga berfungsi sebagai alat untuk memperkuat hegemoni ideologis yang selaras dengan agenda politik tertentu. Ajaran yang diajarkan di madrasah ini sering memperkuat narasi anti-Syi'ah, yang memperburuk *segregasi* sektarian dan memperparah ketegangan politik antara komunitas Sunni dan Syi'ah (Ibad, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa kurikulum di madrasah-madrasah konservatif ini tidak hanya mencakup ajaran keagamaan, tetapi juga ideologi yang kaku, yang mendorong kebencian terhadap kelompok Syi'ah.

Pendidikan ini pada dasarnya menciptakan ruang bagi perkembangan paham radikal, yang juga didukung oleh hubungan erat antara beberapa madrasah dengan kelompok politik atau militan yang mengejar tujuan politik melalui kekerasan (S. Saif et al., 2024). Lebih jauh lagi, kebijakan pemerintah Pakistan sering kali gagal mereformasi atau mengawasi sistem pendidikan agama ini. Hal ini memperkuat kekuasaan kelompok-kelompok yang memiliki agenda politik tertentu, menggunakan pendidikan sebagai instrumen untuk memobilisasi dukungan terhadap ideologi mereka. Pendidikan agama yang intoleran ini menjadi alat untuk membentuk pemikiran generasi muda, mempengaruhi bagaimana mereka memandang agama dan peran mereka dalam masyarakat (Zafar & Ahmad, 2023). Dengan demikian, pendidikan di beberapa madrasah Sunni konservatif menjadi bagian dari dinamika politik yang lebih besar, memperkuat ketegangan sektarian di negara itu.

Konteks Iran

Sebaliknya, Iran, setelah Revolusi Islam 1979, secara resmi menjadi negara yang mengadopsi ideologi Syi'ah sebagai landasan politik dan sosialnya. Pendidikan di Iran tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan pengetahuan keagamaan dan akademis, tetapi juga sebagai alat ideologis untuk memperkuat legitimasi politik rezim. Doktrin Syi'ah, khususnya konsep *Wilayat al-Faqih*, dijadikan sebagai dasar filosofis dan teologis dalam sistem pendidikan Iran. Kurikulum pendidikan agama di sekolah-sekolah Iran sangat dipengaruhi oleh pemahaman Syi'ah, yang terkadang membatasi diskusi tentang mazhab Sunni dan pandangan Islam yang lebih pluralis (Ungusari, 2015) (Cabi, 2020).

Namun, meskipun pendidikan di Iran sangat terpusat pada ajaran Syi'ah, negara ini juga menghadapi komunitas Sunni, terutama di wilayah perbatasan seperti Kurdistan dan Baluchistan. Tantangan besar bagi sistem pendidikan Iran adalah bagaimana mengakomodasi keberagaman Islam di negara tersebut, terutama dalam menghadapi tuntutan otonomi dari komunitas Sunni yang merasa terpinggirkan secara politis dan sosial. Oleh karena itu, pendidikan di Iran menjadi sarana yang strategis untuk mengatur dan memelihara stabilitas politik di

tengah masyarakat yang majemuk secara sektarian.(Mirzaei, 2021) Iran telah menghadapi tantangan besar dalam mengelola keragaman komunitas agama, khususnya minoritas Sunni di provinsi seperti Kurdistan dan Baluchistan. Meskipun sistem pendidikan Iran sangat berpusat pada ajaran Syi'ah, upaya untuk mengatasi masalah yang dihadapi komunitas Sunni masih terbatas. Diskriminasi dan kurangnya sumber daya terus memengaruhi komunitas Sunni di wilayah-wilayah ini, di mana layanan pendidikan dan layanan lainnya sering kali kurang didanai. Banyak komunitas Sunni merasa terpinggirkan secara politik dan sosial,(Rogerson, B. (2024). *The House Divided: Sunni*, n.d.) karena mereka tidak dilibatkan dalam peran-peran penting pemerintahan dan menghadapi pembatasan dalam menjalankan praktik keagamaan mereka.

Secara strategis, pemerintah Iran berupaya mempertahankan kendali dan mencegah pemberontakan dengan menggunakan pendidikan sebagai alat untuk memperkuat ideologi negara, sambil secara bersamaan menekan tuntutan otonomi dari komunitas Sunni. Sentralisasi pendidikan agama yang berpusat pada doktrin Syi'ah menyulitkan komunitas Sunni untuk mendapatkan representasi atau pengaruh dalam sistem pendidikan.(Masood, 2018) Ketidakseimbangan ini telah menyebabkan ketidakpuasan yang semakin meningkat, dengan terjadinya protes, terutama di Baluchistan dan Kurdistan, yang menyoroti keluhan politik dan keagamaan.(Mosawi, 2024) Saat Iran menghadapi perpecahan sektarian ini, tantangannya adalah bagaimana mengintegrasikan kelompok-kelompok agama yang beragam ke dalam kerangka nasional yang bersatu sambil mengelola kebutuhan pendidikan dan budaya mereka yang berbeda.

Tantangan dan Peluang Integrasi

Integrasi doktrin Sunni dan Syi'ah dalam pendidikan di kedua negara ini merupakan isu yang sangat penting, terutama mengingat potensi konflik yang sering muncul dari perbedaan ideologis tersebut. Pada satu sisi, pendidikan dapat menjadi sarana untuk memperkuat perpecahan sektarian, terutama jika tidak ada upaya untuk menyertakan perspektif yang lebih luas tentang keberagaman dalam Islam(Syed & Khan, 2024). Pada sisi lain, pendidikan juga memiliki potensi besar untuk menjadi jembatan bagi dialog antar mazhab, terutama jika ada upaya yang sungguh-sungguh untuk menciptakan kurikulum yang lebih inklusif dan toleran.(Alishahi et al., 2019)

Mencermati berbagai pemikiran di atas, penelitian ini berusaha untuk menganalisis bagaimana perspektif politik-ideologis memengaruhi sistem pendidikan Islam di Pakistan dan Iran, serta mengeksplorasi upaya-upaya yang telah dilakukan atau dapat dilakukan untuk mengintegrasikan kedua doktrin tersebut dalam konteks pendidikan. Dengan

menggunakan pendekatan analisis-deskriptif, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang tantangan dan peluang dalam menciptakan sistem pendidikan Islam yang inklusif dan mampu meredam ketegangan sektarian. Pemahaman yang lebih holistik tentang hubungan antara pendidikan dan ideologi politik akan sangat penting untuk mendukung diskursus yang lebih luas tentang pluralisme dan toleransi dalam pendidikan Islam, serta menciptakan masyarakat yang lebih harmonis di kedua negara tersebut.

METODE

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif-analitis untuk menganalisis bagaimana perspektif politik-ideologis mempengaruhi sistem pendidikan Islam di Pakistan dan Iran, serta mengeksplorasi upaya-upaya yang telah dilakukan atau dapat dilakukan untuk mengintegrasikan doktrin Sunni dan Syi'ah dalam konteks pendidikan. Data dikumpulkan dari literatur akademik, jurnal nasional dan internasional terakreditasi, dokumentasi kebijakan pendidikan Pakistan-Iran, kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif untuk menarik kesimpulan tentang tantangan dan peluang integrasi doktrin-doktrin agama dalam sistem pendidikan di kedua negara tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Ideologi Sunni Dominasi Pendidikan Islam di Pakistan

Pendidikan Islam di Pakistan didominasi oleh ajaran Sunni sebagai refleksi dari mayoritas populasi Muslim yang mengikuti mazhab ini. Sistem pendidikan Islam formal, baik melalui madrasah tradisional maupun sekolah negeri, lebih memfokuskan kurikulum pada ajaran Sunni, yang mencakup interpretasi Sunni terhadap Al-Qur'an, Hadis, dan fikih. Kurikulum ini diadopsi secara luas di seluruh jenjang pendidikan dengan penekanan pada ajaran *Ahli Sunnah wal Jamaah*, yang merupakan mayoritas di negara tersebut(Ghumro, 2022). Madrasah-madrasah di Pakistan memainkan peran signifikan dalam menyebarkan ajaran Sunni, terutama melalui afiliasi dengan berbagai kelompok mazhab, seperti Deobandi dan Barelvi. Di Pakistan, dua dari kelompok Sunni terbesar, yaitu Deobandi dan Barelvi, mengelola banyak madrasah yang memiliki pendekatan berbeda dalam ajaran Islam. Deobandi lebih konservatif, sedangkan Barelvi, meskipun Sunni, memiliki unsur tasawuf yang lebih kuat dalam kurikulum mereka(Jeff rey Haynes, n.d.).

Di sisi lain, representasi ajaran Syi'ah di Pakistan sering kali terabaikan dalam kurikulum pendidikan. Komunitas Syi'ah, yang mencakup sekitar 15-20% dari populasi, jarang mendapat tempat yang signifikan dalam sistem pendidikan formal. Hal ini menciptakan ketidakseimbangan

dalam pengajaran Islam, di mana perspektif Syi'ah sering kali dikesampingkan atau hanya disebutkan secara sekilas. Ketegangan sektarian di Pakistan juga diperburuk oleh pendidikan madrasah yang cenderung mengajarkan pandangan anti-Syi'ah, yang memperlebar jurang antara kedua mazhab.(Hassan, 2011)

Banyak madrasah yang dibiayai oleh kekuatan eksternal, seperti Arab Saudi, yang mendukung ajaran Wahabi atau Salafi yang lebih konservatif(Abbas, 2019). Pengaruh ini semakin memperkuat dominasi Sunni di sistem pendidikan, terutama selama masa pemerintahan Jenderal Zia-ul-Haq pada 1980-an, di mana terjadi Islamisasi negara yang didasarkan pada interpretasi Sunni. Di bawah kebijakan ini, pelajaran agama yang diajarkan di sekolah-sekolah umum dan madrasah dipusatkan pada fiqh Sunni, sementara hukum Syi'ah, seperti Ja'fariyah, tidak mendapat perhatian yang sama.(Ramdhani, M. T., & Usop, n.d.))Konsekuensi dari pendekatan pendidikan yang mendominasi satu mazhab ini adalah meningkatnya ketegangan sektarian di antara Sunni dan Syi'ah, terutama di wilayah-wilayah dengan populasi Syi'ah yang besar seperti Punjab dan Karachi. Komunitas Syi'ah sering merasa terpinggirkan dalam masyarakat, termasuk dalam akses mereka ke sistem pendidikan yang mencerminkan doktrin Sunni yang lebih dominan.(Adolph, 2016)

Pendekatan ini juga membawa tantangan bagi pemerintah Pakistan dalam mengelola stabilitas sosial dan politik, terutama karena pendidikan sering digunakan sebagai alat untuk memperkuat identitas sektarian yang bisa memicu ketegangan lebih lanjut di negara yang plural secara mazhab. Pemerintah Pakistan menghadapi tantangan besar dalam mengelola stabilitas sosial dan politik, terutama dalam konteks pendidikan yang sering digunakan untuk memperkuat identitas sektarian. Kebijakan pendidikan yang ada belum sepenuhnya mencakup upaya untuk mengatasi masalah ini. Salah satu kebijakan penting adalah *National Action Plan* (NAP) yang diluncurkan setelah serangan teroris di negara tersebut, namun fokus pada pendidikan dalam rencana tersebut masih minim. NAP belum mengatur secara jelas tentang kurikulum pendidikan yang mendorong ekstremisme dan sektarianisme.

Salah satu rekomendasi penting adalah perlunya reformasi kebijakan pendidikan untuk menghapus konten yang eksklusif dalam buku teks yang dapat menimbulkan kebencian. Laporan menyebutkan bahwa banyak konten jihad yang ditambahkan pada buku teks sejak tahun 1980-an masih bertahan hingga kini, dan pemerintah tidak memiliki strategi untuk mengatasinya. Selain itu, pemerintah disarankan untuk memasukkan mata pelajaran yang membahas tentang terorisme dan ekstremisme di tingkat universitas sebagai cara untuk melawan ideologi-ideologi yang memecah belah. Selain itu, ada kebutuhan mendesak untuk

mendaftarkan dan memantau madrasah agar mereka tidak menyebarkan ideologi sektarian. Upaya pemerintah untuk mendaftarkan madrasah yang tersebar di seluruh negeri, di mana banyak yang tidak terdaftar dan tidak terawasi, menjadi salah satu langkah penting dalam mainstreaming pendidikan agama dan memastikan bahwa kurikulum yang diajarkan mendukung keberagaman dan toleransi. Dengan demikian, meskipun ada beberapa langkah menuju reformasi, masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mengatasi isu-isu yang berkaitan dengan sektarianisme dalam sistem pendidikan di Pakistan sebagaimana dijelaskan berikut ini.

3.1.1. Dampak Politik-Ideologis Pakistan Terhadap Pendidikan

Pengaruh politik terhadap sistem pendidikan di Pakistan sangat signifikan, terutama dalam kaitannya dengan pembentukan kurikulum dan distribusi sumber daya pendidikan(Manzoor et al., 2024). Sejak kemerdekaan pada tahun 1947, pemerintah Pakistan telah memainkan peran aktif dalam membentuk sistem pendidikan yang berorientasi pada ideologi Sunni, sebagai bagian dari identitas nasional yang berbasis Islam. Pengaruh ini dipicu oleh faktor politik domestik dan tekanan dari berbagai kelompok agama, serta kekuatan politik internasional.(Rofi'Usmani, n.d.)

Selama era pemerintahan Jenderal Zia-ul-Haq pada 1980-an, politik Islamisasi mencapai puncaknya, di mana pendidikan agama diprioritaskan sebagai salah satu alat untuk memperkuat legitimasi politik pemerintah. Zia memperkenalkan reformasi besar dalam sistem pendidikan yang lebih mengedepankan ajaran Sunni, dengan penekanan kuat pada Al-Qur'an dan Hadis menurut tafsir Sunni. Rezim Zia juga menginstitutionalisasi interpretasi Sunni dalam hukum dan kebijakan negara, termasuk sistem pendidikan. Salah satu kebijakan kontroversial yang diadopsi pada saat itu adalah penerapan hukum Zakat yang berbasis fiqh Sunni, yang memicu protes besar dari komunitas Syi'ah, yang merasa kebijakan tersebut mengabaikan sistem hukum mereka sendiri. (M. Saif, 2024)

Dalam pengembangan kurikulum, pemerintah Pakistan sering kali tunduk pada tekanan dari kelompok-kelompok politik dan agama yang kuat, terutama ulama-ulama dari mazhab Sunni yang memiliki kekuatan politik signifikan. Kelompok-kelompok ini memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah pendidikan agama di madrasah dan sekolah negeri. Kurikulum di sekolah-sekolah negeri yang dirancang oleh Dewan Kurikulum Nasional Pakistan juga cenderung mengadopsi perspektif yang selaras dengan pandangan mayoritas Sunni, sementara pandangan Syi'ah jarang mendapat tempat yang setara.(Cecep Suryana, Muhammad Jundy, Wirdatul Hasanah Aini, 2024) Kurikulum tersebut mencakup pelajaran yang

memperkuat narasi sejarah dan teologi Sunni, mengabaikan peran sejarah Syi'ah dalam perkembangan Islam, baik di Pakistan maupun secara global.

Ketidakeimbangan ini tidak hanya menciptakan kesenjangan pendidikan antara kelompok Sunni dan Syi'ah, tetapi juga memperkuat segregasi sosial di antara kedua komunitas. Ketegangan sektarian yang sering kali meledak dalam kekerasan, terutama di kota-kota besar seperti Karachi, sebagian dipicu oleh perbedaan ideologis yang diperkuat melalui pendidikan yang tidak inklusif. Pendidikan yang didominasi oleh satu mazhab ini sering kali digunakan sebagai alat politik untuk mempertahankan hegemoni kelompok mayoritas, yang akhirnya memperburuk ketegangan sektarian.(Lestari et al., 2024)

Lebih lanjut, tekanan internasional juga turut memengaruhi kurikulum pendidikan di Pakistan. Arab Saudi, misalnya, telah memberikan dukungan finansial yang signifikan kepada madrasah-madrasah Sunni yang mengajarkan paham Wahabi, sebuah interpretasi Islam Sunni yang konservatif. Pengaruh ini semakin memperkuat dominasi ideologi Sunni dalam sistem pendidikan, dan mempersempit ruang bagi dialog lintas mazhab(*Mazhab Hanafi*: Umumnya dianut di Asia Selatan, Turki, dan sebagian Eropa, *Mazhab Maliki*: Dominan di Afrika Utara dan bagian Barat, *Mazhab Hanbali*: Utamanya di Arab Saudi dan beberapa bagian Timur Tengah, *Mazhab Ja'fari*: Mazhab utama di kalangan Syi'ah, terutama di Iran dan Lebanon).(Beisenbayev, B., Almukhametov, A., & Mukhametshin, R. (2024). *The Dynamics of Islam in Kazakhstan from an Educational Perspective. Religions*, 15(10), n.d.). Pada saat yang sama, Iran telah memberikan dukungan kepada komunitas Syi'ah di Pakistan untuk membangun lembaga pendidikan mereka sendiri, meskipun tetap terbatas dalam jumlah dan sumber daya.(Jaffrelot, C., & Louër, n.d.)

Di sisi lain, politik pendidikan juga terkait dengan distribusi sumber daya. Sekolah-sekolah yang berafiliasi dengan kelompok Sunni sering kali mendapatkan akses lebih besar terhadap pendanaan pemerintah dan sumber daya, sementara sekolah-sekolah Syi'ah, terutama di daerah-daerah mayoritas Syi'ah, sering kali kekurangan dana dan fasilitas yang memadai(Singer, 2001). Hal ini menciptakan ketidaksetaraan dalam akses terhadap pendidikan berkualitas, yang semakin memperdalam ketegangan sektarian di Pakistan.

Dengan demikian, pengaruh politik terhadap pendidikan di Pakistan telah memperkuat hegemoni Sunni dan mengabaikan kebutuhan serta kehadiran komunitas Syi'ah. Pendidikan telah menjadi alat bagi aktor-aktor politik untuk memajukan agenda ideologis mereka, yang dalam banyak kasus berdampak pada meningkatnya segregasi dan

konflik sektarian dalam masyarakat Pakistan.(Suwandi, 2024)

3.1.1.1. Dampak Sosial dan Budaya

Dominasi ajaran Sunni dalam sistem pendidikan di Pakistan, baik di sekolah-sekolah umum maupun madrasah, sering kali menghasilkan pola pikir yang eksklusif di kalangan siswa. Sistem ini memperkuat pemahaman sektarian yang sempit, yang cenderung mengesampingkan keberadaan mazhab lain seperti Syi'ah. Pengajaran agama yang terfokus pada interpretasi Sunni menekankan teologi, hukum, dan praktik-praktik keagamaan berdasarkan perspektif Sunni, yang sering kali mengabaikan pandangan-pandangan Syi'ah. Akibatnya, siswa Sunni dapat mengembangkan persepsi yang kurang akurat atau bahkan negatif terhadap Syi'ah, yang mengarah pada stereotip dan prasangka yang mendalam.(Nawab, 2007)

Pola pikir ini kemudian diperkuat oleh literatur sekolah dan kurikulum agama yang sering kali tidak memberikan ruang untuk pandangan yang beragam dalam Islam. Buku-buku teks di sekolah umum cenderung menggambarkan sejarah Islam dari perspektif Sunni, dengan narasi yang mencerminkan kontribusi dan pandangan Sunni secara dominan. Syi'ah, jika disebutkan, sering kali hanya diberi perhatian sekilas dan tidak diberikan konteks yang memadai untuk memahami kontribusi intelektual dan sejarahnya dalam peradaban Islam (Anah, 2021).

Situasi ini tidak hanya menciptakan ketidakadilan pendidikan, tetapi juga berpotensi menimbulkan sikap intoleran dan eksklusivitas di antara siswa Sunni terhadap komunitas Syi'ah. Stereotip negatif yang berkembang di kalangan siswa terhadap ajaran Syi'ah sering kali diperparah oleh pengaruh para guru atau ulama di madrasah yang mungkin memiliki pandangan sektarian yang kuat. Hal ini memperkuat segregasi sektarian di masyarakat, menciptakan jarak sosial dan prasangka di antara komunitas Sunni dan Syi'ah.(Chaulia, 2007)

Bagi siswa dari komunitas Syi'ah, dominasi ajaran Sunni dalam pendidikan dapat menyebabkan perasaan keterpinggiran. Mereka sering kali merasa identitas agama mereka tidak dihargai atau diakui dalam lingkungan pendidikan formal, yang dapat memengaruhi rasa percaya diri dan keterlibatan mereka dalam proses belajar mengajar.(Brown & Nasr, 2006) Hal ini juga bisa berdampak pada keterlibatan sosial mereka di masyarakat yang lebih luas. Siswa dari komunitas Syi'ah dapat merasa terisolasi secara kultural dan religius, yang berdampak pada perkembangan identitas dan interaksi sosial mereka.

Meski ada upaya untuk mengadopsi kurikulum yang lebih inklusif, terutama di wilayah dengan populasi Syi'ah yang signifikan seperti Gilgit-Baltistan, tantangan yang dihadapi tetap besar.

Gilgit-Baltistan adalah salah satu wilayah di Pakistan di mana komunitas Syi'ah membentuk mayoritas atau setidaknya jumlah yang signifikan. Di wilayah ini, beberapa lembaga pendidikan telah berupaya memasukkan pandangan Syi'ah ke dalam kurikulum mereka, meskipun upaya ini sering terbatas pada institusi tertentu dan menghadapi resistensi dari struktur pendidikan yang lebih besar. Institusi pendidikan yang didominasi oleh ajaran Sunni atau berafiliasi dengan kelompok politik tertentu sering kali menolak perubahan kurikulum yang lebih inklusif karena mereka menganggapnya sebagai ancaman terhadap dominasi ideologis mereka.(Sayej, 2019)

Selain itu, stigma sosial yang melekat pada ajaran Syi'ah juga menjadi hambatan utama. Stigma ini diperkuat oleh narasi politik dan sosial yang melihat ajaran Syi'ah sebagai minoritas yang tidak sah secara historis dan teologis. Persepsi ini, yang terus diperkuat melalui berbagai saluran politik, agama, dan pendidikan, menjadikan upaya integrasi pandangan Syi'ah dalam kurikulum pendidikan sebagai tantangan yang kompleks. Masyarakat Sunni yang lebih konservatif sering melihat inklusi ajaran Syi'ah sebagai ancaman terhadap kemurnian ajaran Islam yang mereka yakini.(Philpott, n.d.)

Meskipun ada beberapa lembaga pendidikan yang berusaha untuk mengadopsi pendekatan yang lebih pluralis dalam sistem pendidikan, terutama di daerah-daerah dengan kehadiran komunitas Syi'ah yang signifikan, tantangan struktural dan budaya tetap menjadi hambatan besar dalam menciptakan sistem pendidikan yang lebih inklusif di Pakistan.

3.2. Doktrin Syi'ah Dominasi Pendidikan Islam di Iran

Sebagai negara dengan mayoritas penduduk beraliran Syi'ah, sistem pendidikan di Iran secara tegas berlandaskan pada ajaran Syi'ah. Kurikulum pendidikan nasional dirancang untuk menanamkan nilai-nilai Syi'ah dalam pendidikan, dengan fokus pada sejarah, teologi, dan etika Syi'ah. Pendidikan agama menjadi bagian integral dari kurikulum, di mana siswa diajarkan tentang pentingnya ajaran Syi'ah dalam konteks sosial dan politik negara. Berikut beberapa faktor yang mempengaruhi dominasi doktrin Syi'ah dalam pendidikan Islam di Iran

3.2.1. Dampak Revolusi Islam di Iran terhadap Sistem Pendidikan

Setelah Revolusi Islam 1979, pendidikan di Iran mengalami perubahan besar dengan integrasi kuat ideologi Syi'ah ke dalam sistem pendidikan. Revolusi ini tidak hanya menggulingkan pemerintahan monarki Pahlavi, tetapi juga membawa perubahan mendasar dalam berbagai sektor, terutama dalam pendidikan, dengan tujuan memperkuat identitas nasional dan agama.

Pendidikan tidak lagi hanya berfungsi sebagai sarana untuk menyampaikan pengetahuan, tetapi juga sebagai alat strategis untuk menanamkan ideologi revolusioner yang berbasis pada prinsip-prinsip Syi'ah.(Gujarati & Porter, 2010). Pengaruh kuat dari revolusi Iran yang dipimpin Ayatullah Imam Khomeini itu memiliki dampak yang sangat signifikan dalam sistem pendidikan Iran hingga penelitian ini berlangsung, yaitu:

3.2.1.1. Pendidikan sebagai Alat Ideologis

Pemerintah pasca-revolusi menjadikan pendidikan sebagai media utama untuk mentransfer nilai-nilai revolusi Islam kepada generasi muda. Ideologi *Wilayat al-Faqih* (otoritas tertinggi para ahli hukum Islam) yang diperkenalkan oleh Ayatollah Khomeini menjadi pusat filsafat politik dan pendidikan di Iran. Doktrin ini tidak hanya menjelaskan peran ulama dalam mengawasi pemerintahan, tetapi juga menekankan pentingnya kepemimpinan spiritual yang berasal dari ulama Syi'ah dalam setiap aspek kehidupan, termasuk pendidikan. Kurikulum pendidikan agama di sekolah-sekolah Iran dikembangkan dengan sangat kuat berdasarkan ajaran ini.(Kyrychenko, 2018)

Materi pelajaran sejarah dan agama mencakup peran besar tokoh-tokoh Syi'ah dalam sejarah Islam dan perlawanan mereka terhadap tirani, dengan penekanan pada peristiwa Karbala dan perjuangan Imam Husain sebagai simbol melawan ketidakadilan. Kurikulum ini dirancang untuk menciptakan kesadaran politik dan religius di kalangan siswa, di mana perjuangan melawan penindasan dan perlawanan terhadap kekuasaan asing menjadi nilai inti yang ditanamkan. Buku-buku teks sering kali menggambarkan sejarah Islam dari perspektif Syi'ah, dengan pengajaran tentang perjuangan para Imam Syi'ah dan pentingnya mempertahankan identitas Syi'ah di tengah tekanan internal dan eksternal(Utomo, 2023)

Berikut adalah nama-nama **Imam Dua Belas** yang diakui dalam tradisi Syi'ah:

1. **Imam Ali bin Abi Thalib** (Imam Pertama)
2. **Imam Hasan bin Ali** (Imam Kedua)
3. **Imam Husain bin Ali** (Imam Ketiga)
4. **Imam Ali Zain al-Abidin** (Imam Keempat)
5. **Imam Muhammad al-Baqir** (Imam Kelima)
6. **Imam Ja'far al-Sadiq** (Imam Keenam)
7. **Imam Musa al-Kadhim** (Imam Ketujuh)
8. **Imam Ali al-Ridha** (Imam Kedelapan)
9. **Imam Muhammad al-Jawad** (Imam Kesembilan)
10. **Imam Ali al-Hadi** (Imam Kesepuluh)
11. **Imam Hasan al-Askari** (Imam Kesebelas)
12. **Imam Muhammad al-Mahdi** (Imam Kedua Belas, yang diyakini sebagai Imam yang hilang)(Rezaie Khanghah, 2007)

Buku-buku teks yang digunakan dalam pendidikan Syi'ah sering kali menggambarkan

kisah-kisah perjuangan para Imam ini, dan menekankan pentingnya menjaga identitas Syi'ah di tengah berbagai tantangan.(Suwandi, 2024) Misalnya, karya-karya Imam Khomeini dan Murthadha Mutthahari sangat berkontribusi dalam menjelaskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang menjadi dasar ajaran Syi'ah, serta bagaimana sejarah para Imam Syi'ah relevan dengan konteks sosial dan politik masa kini.

3.2.1.2. Penguatan Identitas Nasional Berbasis Syi'ah

Identitas nasional Iran yang baru pasca-revolusi sangat terikat pada ajaran Syi'ah, dan ini tercermin dalam sistem pendidikan yang disesuaikan untuk mendukung legitimasi rezim yang berbasis Syi'ah. Pendidikan agama tidak hanya diajarkan sebagai bagian dari pembelajaran formal, tetapi menjadi inti dari tujuan pembentukan identitas siswa sebagai bagian dari "umat" Islam yang dipimpin oleh ulama Syi'ah. Para siswa diajarkan tentang tanggung jawab moral mereka untuk menjaga integritas Islam dan melindungi revolusi dari ancaman eksternal, seperti pengaruh Barat atau negara-negara Sunni di sekitar Iran. (An-nabhani, n.d.)

Pelajaran dalam sistem pendidikan Iran juga mencakup pengajaran mengenai konsep-konsep seperti "jihad", baik dalam arti fisik maupun spiritual, dengan tujuan mempersiapkan generasi muda untuk membela negara dan agama mereka dari ancaman eksternal. (Aghjivan et al., n.d.) Nilai-nilai ini dipupuk sejak dini melalui kurikulum yang sangat terpolitisasi, di mana peran Iran sebagai pusat Islam Syi'ah dalam politik global ditegaskan kembali .

3.2.1.3. Sistem Madrasah dan Sekolah Umum

Revolusi juga memperkuat peran madrasah dalam sistem pendidikan Iran. Sekolah-sekolah keagamaan ini berperan besar dalam mendidik generasi muda tentang doktrin Syi'ah yang lebih mendalam. Lembaga-lembaga ini tidak hanya mengajarkan teologi, tetapi juga politik, dengan fokus pada pengajaran tentang bagaimana Syi'ah berperan dalam gerakan revolusi global melawan ketidakadilan. (Zaman, n.d.). Sekolah-sekolah ini memberikan pendidikan agama yang lebih tinggi, dan sering kali berfungsi sebagai "saluran" bagi siswa untuk terlibat lebih dalam dalam gerakan politik Islam Syi'ah, baik di dalam Iran maupun di negara-negara lain. (Haynes, n.d.)

Selain itu, sekolah-sekolah umum di Iran yang berafiliasi dengan negara juga mengikuti kurikulum yang diatur oleh pemerintah, di mana ajaran Syi'ah dominan dalam semua mata pelajaran agama. Tidak ada ruang untuk perspektif Sunni atau mazhab Islam lainnya, yang mencerminkan hegemoni ideologi Syi'ah dalam sistem pendidikan Iran. Kurikulum ini sangat terpusat pada narasi revolusi dan perjuangan melawan Barat, terutama Amerika Serikat dan Israel, yang sering kali digambarkan sebagai musuh

utama dalam literatur pendidikan Iran. (Akbar, 2021)

3.2.1.4. Impak Sosial dan Politik

Pengaruh dari pendidikan yang berpusat pada ideologi Syi'ah ini terlihat jelas dalam masyarakat Iran pasca-revolusi. Generasi muda yang dididik dalam sistem ini sering kali memiliki pemahaman yang mendalam tentang politik Syi'ah dan tanggung jawab mereka terhadap negara dan revolusi. Ini berdampak pada kesadaran politik yang tinggi di kalangan masyarakat, di mana siswa-siswa yang telah melalui sistem pendidikan tersebut cenderung terlibat aktif dalam berbagai aktivitas politik, baik di tingkat lokal maupun internasional .(Olsen, n.d.)

Namun, fokus yang berlebihan pada ideologi Syi'ah juga menimbulkan tantangan bagi komunitas Sunni yang tinggal di Iran, terutama di daerah-daerah seperti Kurdistan dan Baluchistan. Komunitas Sunni merasa terpinggirkan dalam sistem pendidikan yang terlalu terpusat pada Syi'ah, dan mereka sering kali kesulitan untuk mendapatkan pengakuan yang setara dalam pendidikan formal.(Paivandi, n.d.) Hal ini menimbulkan ketegangan sektarian yang terus berlanjut di beberapa bagian negara .

Dari kebijakan pendidikan yang diterapkan setelah Revolusi Islam Iran telah berhasil memperkuat identitas nasional dan religius berdasarkan prinsip-prinsip Syi'ah. Sistem pendidikan ini tidak hanya mendidik generasi muda tentang ajaran agama, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai revolusioner yang penting untuk mempertahankan legitimasi politik rezim. Setelah Revolusi Islam, kebijakan pendidikan di Iran berfokus pada penguatan identitas nasional dan religius berdasarkan prinsip-prinsip Syi'ah. Kebijakan ini berhasil mengintegrasikan nilai-nilai revolusi ke dalam kurikulum, memberikan penekanan yang signifikan pada ajaran Syi'ah dan peran politiknya. Dalam konteks ini, pendidikan tidak hanya menjadi sarana untuk mendidik generasi muda tentang agama, tetapi juga untuk mempromosikan legitimasi politik rezim yang berkuasa.(Vahabi, n.d.).

Namun, pendekatan ini juga menyebabkan keterbatasan dalam mengakomodasi pluralisme di kalangan umat Islam. Meskipun Iran memiliki komunitas Sunni yang signifikan, terutama di wilayah seperti Kurdistan dan Baluchistan, kebijakan pendidikan yang ada cenderung mengabaikan diskusi tentang mazhab lain. Ruang untuk memahami dan berdialog tentang perbedaan mazhab menjadi sangat terbatas, yang berpotensi memperdalam kesenjangan sektarian dalam masyarakat.(Zahra et al., 2024). Meskipun pendidikan di Iran berhasil menciptakan generasi yang memahami ajaran Syi'ah secara mendalam, kebutuhan untuk memperluas pemahaman tentang pluralisme dalam Islam menjadi semakin mendesak. Jika tidak ditangani, hal ini dapat menghambat upaya untuk membangun kohesi sosial

dalam masyarakat yang majemuk secara sektarian.

3.3. Menutup Rapat Dialog Pluralisme dalam Sistem Pendidikan Iran

Setelah Revolusi Islam 1979, kebijakan pendidikan di Iran sangat berfokus pada penguatan identitas Syi'ah, yang pada satu sisi berhasil mengintegrasikan nilai-nilai revolusi dan teologi Syi'ah ke dalam kurikulum. Namun, di sisi lain, kebijakan ini menimbulkan sejumlah keterbatasan dalam mengakomodasi pluralisme di kalangan umat Islam. Pendidikan di Iran cenderung memberikan ruang yang terbatas untuk diskusi tentang mazhab lain dalam Islam, terutama Sunni, meskipun terdapat komunitas Sunni yang signifikan di beberapa bagian negara, seperti Kurdistan dan Baluchistan. Keterbatasan dialog antar lintas ideologi yang berbeda dengan Syi'ah, seperti halnya dengan Sunni di Paksistan menjadi salah faktor penghambat integrasi dalam sistem pendidikan di negara Iran. Berikut beberapa hal yang masih sangat dipegang kukuh bagi mayoritas muslim Syi'ah di Iran, yaitu:

a. Minimnya Akses terhadap Pemahaman Lintas Mazhab

Pendidikan agama di Iran cenderung sangat fokus pada doktrin Syi'ah, dengan sedikit ruang untuk mempelajari perspektif mazhab Sunni atau mazhab lainnya dalam Islam. Kurikulum agama di sekolah-sekolah umum dan madrasah lebih mengedepankan ajaran-ajaran yang sesuai dengan pandangan Syi'ah, yang mengabaikan pluralisme intra-Islam. Ketidakeimbangan ini dapat memperkuat perbedaan sektarian dan mempersempit pemahaman siswa terhadap spektrum keislaman yang lebih luas. Mereka yang dididik dalam sistem ini cenderung tidak terpapar dengan perspektif Sunni secara akademis, dan ini berpotensi memperburuk stereotip serta prasangka antar-mazhab di dalam masyarakat. (Krause et al., 2019)

Akibat dari minimnya keterbukaan terhadap doktrin Sunni, pendidikan di Iran berisiko menciptakan generasi yang kurang siap untuk berinteraksi dengan dunia Islam yang lebih luas. (Aarabi & Ansari, 2019) Siswa mungkin tumbuh dengan pandangan yang sempit tentang Islam, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi pandangan mereka tentang negara-negara tetangga yang beraliran Sunni, seperti Arab Saudi, Pakistan, dan negara-negara Teluk lainnya.

b. Kekhawatiran Tinggi terhadap dampak Dialog Sektarian

Keterbatasan dalam diskusi pluralisme ini juga berdampak pada hubungan antar-sektarian di dalam negeri dan di luar Iran. Pendidikan yang terlalu terfokus pada Syi'ah

dapat memicu ketegangan di antara komunitas Sunni yang merasa terpinggirkan baik dalam kebijakan sosial maupun pendidikan. Misalnya, komunitas Sunni di wilayah perbatasan sering kali mengeluhkan kurangnya representasi mereka dalam sistem pendidikan nasional yang terlalu menekankan identitas Syi'ah .

Di tingkat internasional, Iran kerap menghadapi tantangan diplomatik dengan negara-negara tetangga yang mayoritas Sunni, seperti Arab Saudi dan Pakistan. Minimnya pemahaman lintas mazhab dalam pendidikan di Iran membuat upaya dialog sektarian lebih sulit, baik di tingkat diplomasi antarnegara maupun di tingkat komunitas lokal. Pendidikan yang menekankan satu doktrin dan mengabaikan pluralisme berisiko menciptakan generasi yang memiliki sikap antagonistik terhadap Sunni atau bahkan tidak terbuka terhadap gagasan pluralisme intra-Islam. (Arabia, 2024)

c. Potensi Ketegangan dan Ketidakstabilan

Keterbatasan dalam mengakomodasi pluralisme dalam pendidikan dapat meningkatkan risiko ketegangan sektarian, terutama di wilayah-wilayah dengan populasi Sunni yang signifikan. Dengan pendidikan yang tidak memberi ruang bagi ajaran Sunni, ketidakpuasan di kalangan komunitas Sunni dapat meningkat. Mereka sering merasa terpinggirkan baik secara politik maupun sosial. Misalnya, di daerah seperti Sistan-Baluchistan dan Kurdistan, ketegangan antara komunitas Sunni dan pemerintah yang mayoritas Syi'ah kerap terjadi. Pendidikan yang inklusif dan toleran bisa menjadi alat yang efektif untuk memitigasi ketegangan ini, tetapi kurangnya pluralisme dalam kurikulum justru memperburuk situasi. Selain itu, sikap yang eksklusif terhadap doktrin Syi'ah dalam pendidikan berpotensi menciptakan pandangan yang lebih sempit mengenai Islam di kalangan siswa. (Council, 2018) Hal ini berbahaya karena memperkuat narasi yang mengisolasi Iran dari dunia Muslim yang lebih luas, yang sebagian besar beraliran Sunni. Ini tidak hanya merugikan hubungan diplomatik Iran dengan negara-negara tetangganya tetapi juga menciptakan jurang pemisah antara komunitas Sunni dan Syi'ah di dalam negeri.

d. Sikap Keterbukaan yang Terbatas

Meskipun begitu, ada beberapa upaya terbatas untuk memperkenalkan pluralisme dalam diskusi keagamaan, terutama melalui program-program tertentu di universitas yang membuka ruang untuk studi Islam lintas mazhab. Namun, upaya ini masih sangat terbatas dalam lingkungannya dan sering kali terbentur oleh resistensi politik serta sosial dari kelompok-kelompok konservatif yang mendominasi

kebijakan pendidikan. (Zahirinejad, 2024)

Salah satu jalan yang dapat diambil untuk mengatasi tantangan ini adalah dengan mendorong program pendidikan yang lebih inklusif, di mana siswa diperkenalkan pada keragaman dalam Islam sejak dini. Mengintegrasikan perspektif Sunni dan mazhab Islam lainnya dalam kurikulum dapat membantu menciptakan pemahaman yang lebih luas tentang pluralisme intra-Islam, serta mendukung dialog lintas sektarian yang lebih sehat (Haidar et al., 2023)

Dengan demikian keterbatasan dalam diskusi pluralisme di Iran terutama disebabkan oleh dominasi ajaran Syi'ah dalam sistem pendidikan. Kurikulum yang tidak memberi ruang bagi ajaran Sunni dan mazhab lain berpotensi memperdalam perpecahan sektarian di dalam negeri dan memperburuk hubungan Iran dengan negara-negara mayoritas Sunni. (Arana, 2024) Oleh karena itu sangat penting mengupayakan untuk menciptakan pendidikan yang lebih inklusif diperlukan agar ketegangan sektarian dapat diatasi dan pluralisme intra-Islam bisa berkembang dengan lebih baik.

Upaya Integrasi Doktrin Sunni-Syi'ah

Integrasi doktrin Sunni dan Syi'ah dalam pendidikan di Pakistan dan Iran memang merupakan isu yang kompleks, terlebih dipengaruhi oleh faktor politik, sosial, dan sejarah yang mendalam. Berikut beberapa upaya sekaligus tantangan yang dihadapi dalam proses integrasi ini:

1. Membuka Diri terhadap Perbedaan Teologis

Doktrin Sunni dan Syi'ah memiliki perbedaan teologis yang signifikan, termasuk dalam hal kepemimpinan, otoritas religius, dan interpretasi ajaran Islam. Di Pakistan, misalnya, pendidikan sering kali lebih menekankan pada ajaran Sunni, yang menciptakan kekosongan dalam pemahaman ajaran Syi'ah. Siswa yang tidak mendapatkan akses ke pengetahuan tentang kedua doktrin mungkin tumbuh dengan pandangan yang sempit dan tidak toleran terhadap perbedaan. Di Iran, pendidikan yang berbasis pada ideologi Syi'ah mengabaikan keberagaman dalam Islam, yang membatasi diskusi tentang ajaran Sunni dan aliran lain. (Myaskur et al., 2024)

2. Mengakomodasi Kebijakan Pendidikan yang Terbuka

Kebijakan pendidikan di Pakistan sering kali dipengaruhi oleh kelompok politik yang mayoritas Sunni, yang dapat mengakibatkan pengabaian ajaran Syi'ah dalam kurikulum resmi. Hal ini menciptakan ketidakadilan dalam distribusi pendidikan dan sumber daya, serta memperburuk ketegangan sektarian

yang sudah ada.

Sebaliknya, di Iran, kebijakan pendidikan sangat terpusat pada doktrin Syi'ah, yang mempersulit upaya untuk mengakomodasi komunitas Sunni dan mengedukasi siswa tentang keberagaman dalam Islam.

3. Menepis Stigma Sosial dan Keterasingan

Siswa dari komunitas Syi'ah di Pakistan sering merasa terpinggirkan dalam sistem pendidikan yang didominasi oleh ajaran Sunni. Ini dapat menciptakan identitas yang terfragmentasi dan mengurangi rasa percaya diri mereka. Di Iran, meskipun ada upaya untuk memperkuat identitas Syi'ah, pengabaian terhadap ajaran Sunni dapat menimbulkan stigma sosial bagi siswa Sunni, yang merasa diabaikan dan tidak diakui.

4. Meminimalisir Radikalisasi

Di Pakistan, ada kekhawatiran tentang radikalisasi di kalangan madrasah yang mengajarkan ajaran yang lebih ekstrem dan intoleran terhadap penganut Syi'ah. Beberapa lembaga pendidikan memperkuat pandangan yang kaku, yang dapat mengakibatkan peningkatan ketegangan sektarian. Sementara di Iran, meskipun ada ideologi yang mendorong toleransi, masih ada tantangan dalam mengelola komunitas Sunni yang merasa terpinggirkan, yang dapat mengarah pada potensi radikalisasi.

5. Perkuat Dialog Lintas Mazhab

Upaya untuk menciptakan dialog yang konstruktif antara komunitas Sunni dan Syi'ah dalam konteks pendidikan sering kali terhambat oleh stigma dan ketidakpercayaan. Kurikulum yang tidak inklusif memperburuk situasi ini, di mana siswa tidak mendapatkan kesempatan untuk berdiskusi tentang ajaran satu sama lain, sehingga menghasilkan pandangan yang sempit dan eksklusif.

Berdasarkan analisis di atas berikut beberapa pemikiran konstruktif yang dapat diupayakan untuk meningkatkan integrasi doktrin Sunni dan Syi'ah dalam pendidikan di kedua negara:

1. Pengembangan Kurikulum yang Inklusif

Mendorong pengembangan kurikulum yang mencakup ajaran dari kedua doktrin, dengan fokus pada persamaan dan perbedaan, serta nilai-nilai bersama dalam Islam. Ini dapat dilakukan melalui kolaborasi antara lembaga pendidikan dari kedua kelompok.

2. Pelatihan Literasi Keagamaan Lintas Budaya Bagi Pendidik

Menyediakan pelatihan untuk pendidik tentang keberagaman dalam Islam dan pentingnya mengajarkan toleransi. Ini dapat membantu pendidik untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dialog dan saling pengertian di antara siswa.

3. Membangun Dialog-kolaboratif Antar Umat beragama

Mendorong dialog antaragama di tingkat sekolah dan masyarakat. Kegiatan yang melibatkan siswa dari latar belakang yang berbeda dapat membantu mengurangi prasangka dan stereotip, serta membangun solidaritas antar komunitas.

4. Dukungan Kebijakan Pemerintah

Pemerintah harus mengambil langkah untuk mendukung kebijakan pendidikan yang inklusif dan adil, dengan memberikan sumber daya yang cukup untuk mendukung pengajaran ajaran yang beragam.

5. Peningkatan Kompetensi Pribadi dan Kesadaran Masyarakat

Membangun program kesadaran masyarakat tentang pentingnya toleransi dan keberagaman dalam Islam. Masyarakat yang lebih sadar dapat mendorong perubahan positif dalam sikap terhadap kelompok lain.

Melalui lima upaya di atas diharapkan pendidikan Islam di Pakistan dan Iran dapat berkontribusi untuk terciptanya masyarakat yang lebih harmonis, toleran, dan terbuka terhadap perbedaan, serta mengurangi potensi konflik di masa depan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Pendidikan Islam di Pakistan dan Iran menunjukkan hubungan kompleks antara politik, ideologi, dan doktrin Sunni dan Syi'ah. Di Pakistan, pendidikan umumnya didominasi oleh ajaran Sunni, yang menyebabkan pengabaian ajaran Syi'ah dalam

kurikulum. Pengaruh politik yang kuat turut memengaruhi kebijakan pendidikan, menciptakan pola pikir eksklusif di kalangan siswa dan memperburuk stereotip serta ketegangan sosial.

Sementara itu, pendidikan di Iran berlandaskan ajaran Syi'ah yang sangat terkait dengan identitas nasional dan ideologi politik. Kurikulum yang berfokus pada doktrin Syi'ah sering kali mengabaikan pluralisme, sehingga siswa kurang memahami doktrin lain dalam Islam. Meskipun terdapat beberapa inisiatif untuk menciptakan pendidikan yang lebih inklusif, resistensi dari kebijakan yang ada menghambat kemajuan tersebut.

Dengan lima langkah tersebut, pendidikan Islam di Pakistan dan Iran diharapkan dapat menciptakan masyarakat yang lebih harmonis, toleran, dan terbuka terhadap perbedaan, sekaligus mengurangi risiko konflik di masa depan. Meskipun integrasi doktrin Sunni dan Shia menghadapi tantangan, hal ini juga membuka peluang untuk memperkuat pemahaman dan toleransi antar komunitas. Langkah-langkah seperti pengembangan kurikulum inklusif, pelatihan lintas budaya bagi pendidik, dialog antaragama, kebijakan pendidikan yang adil, serta peningkatan kesadaran masyarakat, dapat berkontribusi pada terciptanya masyarakat yang damai dan menghargai keragaman, serta mengurangi potensi konflik sektarian.

Saran

Untuk menciptakan sistem pendidikan Islam yang inklusif dan toleran di Pakistan dan Iran, disarankan agar pemerintah dan institusi pendidikan mereformasi kurikulum guna mengintegrasikan ajaran Sunni dan Syi'ah secara seimbang, menyediakan pelatihan pendidik berbasis pluralisme, mendirikan pusat kajian lintas mazhab, serta mengembangkan kebijakan pendidikan yang menghilangkan intoleransi sektarian dan memperkuat dialog antarmazhab, sehingga dapat mendukung harmoni sosial dan mencegah konflik sektarian di masa depan.

PUSTAKA ACUAN

- Aarabi, K., & Ansari, A. (2019). Ideology-and-Iran-s-Revolution-How-1979-Changed-the-World. *Tony Blair Institute for Global Change*, 1–31.
- Abbas, Z. (2024). (2019). Political and Economic Conflict between Iran and Saudi Arabia and its Impact on South Asia. *SOCIAL PRISM*, 1(2), 27–41. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14.
- Adolph, R. (2016). *Ulum, R. (2020). Penanganan Paham Gerakan Transnasional di Negara Pakistan, Lebanon, Brunei Darussalam*. 1–23.
- Aghjivan, S. H., Afkari, F., & Islami, E. (n.d.). *Explaining The Curriculum of Moral Education in The Second Grade of Elementary School Based On Ibn Sina ' s Thoughts and Opinions Moral education is crucial in the structure of the educational system , as ethics and moral upbringing form the foundation of*.
- Akbar, A. (2021). Freedom of religion: The contribution of contemporary Iranian reformist scholars. *Religions*, 12(6). <https://doi.org/10.3390/rel12060384>
- Ali, B., Ijaz, S., Asghar, A., & Touseef, M. (2024). Race and religion in Pakistani society: Complexities and emerging challenges for cultural pluralism, human rights, and national integration. *Remittances Review*, 9(1), 736–748.
- Alishahi, A., Dashtban, E., & Pour, Z. H. (2019). *Wahhabi Thoughts in Pakistan and the Challenges in Pakistan- Iran Relations*. 3(3), 19–31.
- An-nabhani, T. (n.d.). *GERAKAN SOSIAL ISLAM DI INDONESIA*.
- Anah, S. (2021). Pondok Pesantren sebagai Wadah Moderasi Islam di Era Generasi Milenial. *Jurnal Keislaman*, 4(1), 32–47. <https://doi.org/10.54298/jk.v4i1.3273>
- Arabia, S. (2024). *RECONCILING Exploring the Implications of Détente RECONCILING*.
- Arana, G. (2024). *Saudi Arabia and Iran in the Shadows of a Regional War. September*.
- Baradaran Amini, S. (2024). A shift in Shia discourse: Political necessities and Sectarian dynamics (Doctoral dissertation, U. of I. at U.-C. (2024). © 2024 Sahar Baradaran Amini.
- Beisenbayev, B., Almkhmetov, A., & Mukhametshin, R. (2024). The Dynamics of Islam in Kazakhstan from an Educational Perspective. *Religions*, 15(10), 1243. (n.d.). 1243 @ www.mdpi.com.
- Brown, L. C., & Nasr, V. (2006). The Shia Revival: How Conflicts within Islam Will Shape the Future. *Foreign Affairs*, 85(6), 174. <https://doi.org/10.2307/20032188>
- Cabi, M. (2020). The roots and the consequences of the 1979 Iranian revolution: A Kurdish perspective. *Middle Eastern Studies*, 56(3), 339–358. <https://doi.org/10.1080/00263206.2020.1722651>
- Cecep Suryana, Muhammad Jundy, Wirdatul Hasanah Aini, dan D. N. R. (2024). "Menguak Jejak Politik Islam di Indonesia (Membincang Partai Politik Islam, Demokrasi dan Khilafah Perspektif KH. Jujun Junaedi)." In *Bandung: Gunung Djati Publishing*.
- Chaulia, S. (2007). 'Shia Democracy': Myth or Reality? *Democracy*, 14(3).
- Council, A. (2018). *Iran ' s Sunnis Resist. March 2015*.
- Ghumro, A. K. (2022). The Growth of Madrassas and Perceived Radicalization: The Case of the Khairpur District, Sindh, Pakistan. *MJIR| Malaysian Journal of International ...*, 10, 22–44.
- Gujarati, D., & Porter, D. (2010). *Basic changes in the Iranian education system before and after Islamic Revolution (Master's thesis, Middle East Technical University)*. December.
- Haidar, A., Kiftiyah, A., Permadi, D. P., Herindar, E., Alim, F. S., Yantari, H. F., Adinugraha, H. H., Inneu, Mudrikah, M., Sanusi, I., Ardhana, I. A., Aziz, M. A., Shulthoni, M., Hendrasto, N., Nasarruddin, R. Bin, Prihatiningsih, T., & Ahady, Y. A. (2023). Moderasi Beragama di Tengah Isu Kontemporer. In *Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan (Vol. 13)*.

- Hassan, H. (2011). From the Pulpit to Ak-47: Sectarian conflict in Jhang, Pakistan. *Pakistan Journal of History and Culture*, 32(2), 67–87.
- Haynes, J. (2020). (n.d.). *df351d874f932daf9c80990197f3ad0da38c573d @ www.scielo.br*.
- Huda, M. (2024). Incorporating the Value of Religious Moderation in Islamic Education Learning. *Al-Hayat: Journal of Islamic Education*, 8(1), 221. <https://doi.org/10.35723/ajie.v8i1.476>
- Ibad, F. (2019). Modernization of Education in Pakistan: A Case Study. *International Journal of Experiential Learning & Case Studies*, 4(2), 254–268. <https://doi.org/10.22555/ijelcs.v4i2.2631>
- Jabbar, N., & Ali, U. (2019). E. as self-government: the M. E. S. answer to managing violence in P. P. S. (n.d.). *TITLE : Education as Self-Government : the Minhaj Education Society 's Answer to Managing Violence in Pakistan AUTHORS : Naheem Education as Self-Government : the Minhaj Education Society 's Answer to Managing Violence in Pakistan*. 1–43.
- Jaffrelot, C., & Louër, L. (Eds.). (2017). P.-I. connections: transnational networks between S. A. and the G. O. U. P. (n.d.). *books @ books.google.com*.
- Jeffrey Haynes. (n.d.). *Kadayifci-Orellana, S. A. (2020). Islamic perspective: Religion in Pakistan's internal conflicts. In On the Significance of Religion in Conflict and Conflict Resolution (pp. 61-73). Routledge.: Vol. i*.
- Krause, D., Svensson, I., & Larsson, G. (2019). Why is there so little shia–sunni dialogue? Understanding the deficit of intra-muslim dialogue and interreligious peacemaking. *Religions*, 10(10). <https://doi.org/10.3390/rel10100567>
- Kyrychenko, V. (2018). Indonesia's Higher Education: Context, Policy, And Perspective. *Asian Journal of Contemporary Education*, 2(2), 159–172. <https://doi.org/10.18488/journal.137.2018.22.159.172>
- Lestari, A., Afriyani, A., Maharani, S., Aprilia, W., Hukum, F., Lampung, U. B., & Hukum, S. (2024). *Kata Kunci: Sosiologi Hukum, Konflik Sosial, Akar Konflik, Dinamika Sosial, Kebijakan Hukum, Integrasi Ilmu Sosial-Hukum*. 5(8).
- Manzoor, A. A., Farooq, R., Zafar, N., & Author, C. (2024). Unveiling the Interplay of Educational Excellence and Talent Mobility: An In-depth Exploration of Pakistan's Educational Revitalization Efforts by the Higher Education Commission (HEC) to Mitigate the Talent Drain Challenge. *Annals of Human and Social Sciences*, 5(II). [https://doi.org/10.35484/ahss.2024\(5-ii\)41](https://doi.org/10.35484/ahss.2024(5-ii)41)
- Masood, E. (2018). The battle for the soul of biodiversity. In *Nature* (Vol. 560, Issue 7719). <https://doi.org/10.1038/d41586-018-05984-3>
- Mirzaei, S. (2021). E. D. of N. M. in I. (2021). Emancipation Discourses of National Minorities in Iran: Analyzing the Discourse of Iranian Azerbaijanis As a Minority Group from a Critical Perspective. *Pharmacognosy Magazine*, 75(17), 399–405.
- Mosawi, S. M. (2024). (2024). *Islamic State Khorasan (Isis-K) In Post Us Withdrawal Afghanistan Dr. Qudsia Akram 1 , Miss Noureen Asif 2*. 11(01), 215–242.
- Murray, A., Durrani, F., Winstanley, A., Keiller, E., Taleb, P. A., Islam, S., Foka, S., Turri, M. G., & Lau, J. Y. F. (2024). Understanding lived experiences and perceptions of resilience in black and South Asian Muslim children living in East London: a qualitative study protocol. *BMJ Open*, 14(4), 1–8. <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2023-082346>
- Myaskur, F. M. A., G.A Zinnia Maulida H, Wardhana, M. K., & Faridillah, N. (2024). Syiah di Mata Anak Muda: Antara Ketakutan dan Keterbukaan akan Keberagaman Agama. *TARUNALAW : Journal of Law and Syariah*, 2(02), 176–196. <https://doi.org/10.54298/tarunalaw.v2i02.200>
- Nawab, M. (2007). *Ulama in Pakistani politics*. 133.
- Olsen, N. (2019). (n.d.). *Revolutionary Religion: Shia Islam and the Iranian Revolution. E-international Relations @ www.e-ir.info*.
- Paivandi, S. (2022). (n.d.). *Non-state actors in education in Iran: select issues and contributions @ policycommons.net*.
- Philpott, D. (2019). R. freedom in I. the fate of a universal human right in the M. world today. O. U. P.

(n.d.). *books @ books.google.com*.

Ramdhani, M. T., & Usop, D. S. (2024). (n.d.). *TRANSFORMASI PENDIDIKAN ISLAM HOLISTIK: STUDI KASUS PENDIDIKAN KADER ULAMA MUHAMMADIYAH DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALANGKARAYA*. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, 11(01), 26-33.

Rezaie Khanghah, R. (2022). (2007). Who Is Imam Mahdi, Prophesied in Other Religions, and from Holy Fatima Lineage?. Prophesied In Other Religions, And From Holy Fatima lineage. In *Social Science Researh Network*.

Rofi'Usmani, A. (2024). M. P. K. P. B. 20 I. M. K. dalam M. dan M. D. I. P. A. K.-20 dan 21. I. P. (n.d.). *books @ books.google.com*.

Rogerson, B. (2024). The House Divided: Sunni, S. and the M. of the M. E. P. B. (n.d.). *books @ books.google.com*.

Saif, M. (2024). Oral History and the Textual Archive: Contemporary Pakistani Shi'i 'Ulama's Recollections and Reflections on Politics and Sectarian Harmony . *Critical Pakistan Studies*, 2023, 1-32. <https://doi.org/10.1017/cps.2024.3>

Saif, S., Bibi, M., & Yaseen, Z. (2024). *Growing Radicalization in Pakistan and Government Tactics : A Critical Analysis*. 8(3).

Sajej, C. (2019). Religion, Violence, and the State in Iraq. *POMEPS Studies*, 35(October), 22-28.

Singer, P. W. (2001). Pakistan's Madrassahs: Ensuring a System of Education Not Jihad. *Analysis Papers*, November.

Suryadi, A. (2024). F. P. I. P. T. dan K. C. J. (Jejak P. (n.d.). *books @ books.google.com*.

Suwandi, I. S. (2024). L. K. (2024). *SHIISM AS AN INTELLIGENCE ELEMENT : THE CASE OF SHIAS OF*. 4(1), 0-3.

Syed, N., & Khan, D. (2024). *Youth Vulnerabilities to Radical Ideologies and Deradicalization in Quetta*. 5(1), 36-61.

Ungusari, E. (2015). Agents of the Hidden Imam: Shiite Juristic Authority in Light of the Doctrine of Deputyship (Doctoral dissertation, Concordia. *Agents of the Hidden Imam: Shiite Juristic Authority in Light of the Doctrine of Deputyship (Doctoral Dissertation, Concordia University)*. *Spectrum.Library.Concordia.Ca*, 151, 10-17.

Utomo, W. W. (2023). P. P. I. (2023). *PEMIKIRAN POLITIK ISLAM*. 061.

Vahabi, M. (2024). (n.d.). *Islamic revolution and Anfal*. *Public Choice*, 200(3), 383-401.

Zafar, M., & Ahmad, S. (2023). *Journal of Global Peace and Security Studies Journal of Global Peace and Security Studies ISSN : 2708-7786*. 4(2), 50-64.

Zahirinejad, M. (2024). Cultural Change in Iran: Women's Rights and the Middle Class. *UR Journal of Humanities and Social Sciences*, 30(1), 107-129. <https://doi.org/10.15584/johass.2024.1.7>

Zahra, R., Inawati, I., & Ariffin, K. (2024). Gender Representation in Indonesian ELT Textbooks: The Hidden Bias. *EDUCATUM Journal of Social Sciences*, 10(1), 2462-2443.

Zaman, S. U. (2024). I. I. R. (n.d.). *Zaman, S. U. (2024). Iran Islamic Revolution*. In *The Palgrave Encyclopedia of Islamic Finance and Economics (pp. 1-10)*. Cham: Springer International Publishing.